

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif (Hanly, 2019). Menurut Nia, Dominicus, dan Amzul (2016) salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yaitu dengan menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Domestic Regional Product*) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selain itu, PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Akan tetapi, ada beberapa teori yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah, dimana inti dari teori-teori tersebut pada dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode

dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian suatu daerah diantaranya:

- a. Data mengenai suatu daerah sangat terbatas.
- b. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah.
- c. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan.
- d. Bagi Negara Sedang Berkembang, selain karena kurang dan terbatasnya data, keakuratan dari data tersebut juga kurang dan relatif sulit untuk dipercaya.

2.1.2 Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan

Kedudukan sektor pertanian dalam tatanan perekonomian nasional kembali memegang peranan cukup penting. Konsep dasar dari pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam pernyataan (Landung, 2004) dimana sektor andalan perekonomian adalah yang memiliki ketangguhan dan ketangguhan tinggi, sektor andalan merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (*leading sector*) perekonomian nasional.

Dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian nasional mempunyai lima syarat yang harus dilihat sebagai kriteria. Kelima syarat tersebut adalah strategis, tangguh, artikulatif, progresif, dan responsif.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, dikarenakan sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Ramlawati, 2020). Maka apabila para perencana hendak memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dengan sungguh-sungguh, satu-satunya cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian (Suryana, 2000).

Sektor pertanian menurut Mimi, Elfiana, dan Martina (2017) termasuk dalam salah satu sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 hanyalah sektor agribisnis, dimana agribisnis memiliki pertumbuhan yang positif (Septiani, 2019).

2.1.3 Kebijakan Pembangunan Sektor Pertanian

Rendahnya produktivitas dalam skala mikro, produksi total secara makro, dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi dalam pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian dalam jangka pendek mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, sedangkan pembangunan pertanian dalam jangka Panjang bertujuan agar memberikan kestabilan harga pelaku usaha. Sehingga secara umum arah kebijakan pertanian adalah memberikan kepastian berlangsungnya usaha baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Azhar, 2014).

Kebijakan secara singkat menurut Yennita (2022) diartikan sebagai dasar dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan, dimana kebijakan diambil dengan berbagai pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.

Dasar utama pentingnya kebijakan pembangunan pertanian diantaranya: (1) tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor pertanian relatif besar, terutama di negara berkembang, (2) sektor pertanian merupakan penyumbang devisa negara terbesar, lebih besar dari sektor pengolahan (industri), (3) transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian masih terasa sulit. Oleh karena itu, pengabaian sektor pertanian akan menyebabkan struktur perekonomian berubah.

Kebijakan pembangunan sektor yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah:

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian.

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender, dan kerjasama luar negeri.
4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

2.1.4 Teori Ekonomi Basis

Teori ekonomi basis menurut Ramlawati (2020) menyatakan bahwa faktor yang menjadi penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari suatu daerah. Penggunaan sumber daya produksi lokal seperti tenaga kerja dan bahan baku dalam proses produksi di sektor industri suatu daerah yang *outputnya* diekspor, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan menciptakan peluang kerja di daerah tersebut (Suryana, 2000).

Inti dari model basis ekonomi (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, akan tetapi juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, atau daerah pariwisata. Sektor industri yang bersifat seperti ini disebut sektor basis. Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran langsung dapat dilaksanakan dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode tersebut mampu menentukan sektor basis secara tepat, akan tetapi dalam metode tersebut akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, sebagian besar para pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran tidak langsung diantaranya metode melalui pendekatan asumsi, metode *Location Quotient* (LQ), metode kebutuhan minimum, dan metode kombinasi (metode melalui pendekatan asumsi dan metode LQ) (Suryana, 2000).

Teori ekonomi basis mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis.

Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang bersifat *endogenous* artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan sehingga kegiatan non basis sering disebut dengan pekerjaan (*service*) yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri (Sudaryanto dan Erizal, 2002).

2.1.5 Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian. Menurut UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkebunan merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen (Rusdi, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional hingga pasar global.

Tondok (1997) membagi jenis perkebunan berdasarkan bentuk pengusahaannya menjadi dua bagian yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Menurut Dinas Perkebunan (2021) perkebunan rakyat (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat

dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat dengan luas lahan yang relatif sempit umumnya 1-2 ha. Perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersil oleh perusahaan yang berbadan hukum dengan luas areal lebih besar dari 25 Ha, yang terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan (Siti dan Nida, 2016). Sedangkan tujuan pembangunan perkebunan jangka menengah menurut Direktorat Jendral Perkebunan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.
- c. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan.
- d. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan.
- e. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.
- f. Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati.
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah.
- h. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan.
- i. Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja.
- j. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 511/Kpts/PD310/9/2006 tentang jenis komoditas, istilah komoditas perkebunan umumnya merujuk kepada sekelompok tanaman atau komoditas tertentu yang mencakup binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura. Lingkup komoditas perkebunan meliputi 124 jenis tanaman ditambah 2 kelompok tanaman penunjang perkebunan yaitu kelompok tanaman penutup tanah serta kelompok tanaman pupuk hijau (Rusdi, 2014). Berdasarkan tingkat permintaan, luas lahan perkebunan aktif serta perkiraan perputaran nilai ekonomi,

terdapat 7 komoditas unggulan perkebunan di Indonesia, diantaranya kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, dan tebu.

2.1.6 Komoditas Unggulan

Perekonomian dalam suatu daerah dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor unggulan dan sektor non unggulan. Sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, sehingga merupakan sektor utama dalam suatu daerah yang dijadikan sebagai acuan perekonomian daerah (Ulfa, dkk, 2019).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah adalah dengan melakukan pengembangan terhadap komoditas yang dianggap unggulan di suatu daerah. Menurut Nova, Abdul, dan Faik (2018) komoditas unggulan merupakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar dengan komoditas pesaingnya karena mempunyai jumlah produksi yang tinggi.

Komoditas unggulan dapat dilihat dari kesuburan lahan, sumber daya, kondisi geografis, serta saran dan prasarana pendukung. Akan tetapi, komoditas dalam suatu daerah tidak semua dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang dianggap layak untuk dilakukan pengembangan dalam bentuk usahatani, dikarenakan komoditas tersebut mempunyai nilai keuntungan bagi petani secara sosial, biofisik dan juga nilai ekonomi (Ayu dan Eko, 2014).

Komoditas unggulan harus dikaitkan dengan suatu perbandingan, baik perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional (Zakiah, dkk, 2015). Pada skala nasional dan regional suatu komoditas dikatakan unggul apabila komoditas tersebut mampu bersaing dengan komoditas yang sama, yang dihasilkan dari wilayah lain di pasar domestik maupun nasional, sedangkan pada skala internasional suatu komoditas dikatakan unggul apabila mampu bersaing dengan komoditi yang sama yang dihasilkan dari negara lain.

Penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan metode LQ, dimana sektor yang dianggap basis ($LQ > 1$) dan tidak basis ($LQ < 1$). Penetapan komoditas unggulan menjadi keharusan agar penggunaan sumberdaya disuatu wilayah lebih efisien dan terfokus, karena hanya

komoditas-komoditas yang diusahakan secara efisien yang mampu bersaing secara berkelanjutan.

2.1.7 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Motode analisis praktis yang dapat digunakan untuk mengukur keuntungan komperatif suatu sektor, subsektor atau komoditi adalah dengan menggunakan koefisien lokasi (*location quotient*) yang mula-mula dikemukakan oleh Robert Murry Haig pada tahun 1928 yang kemudian banyak digunakan dalam bukubuku analisis ekonomi regional.

Analisis *Location Quotient* (LQ) umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu Nasional adalah daerah yang lebih luas.

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor pertanian merupakan sektor basis atau non basis. Menurut Robinson Tarigan (2005) analisis *Location Quotient* (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja.

Location Quotient menurut Niyimbarina (2018) merupakan metrik untuk mengukur konsentrasi relatif atau spesialisasi satu atau lebih industri dalam suatu wilayah yang dapat berupa cluster, kota, wilayah atau provinsi.

LQ sering digunakan dalam membahas kondisi perekonomian yang mengarah pada identifikasi kegiatan perekonomian secara spesialisasi, atau mengukur konsentrasi kegiatan ekonomi secara relatif untuk mendapatkan gambaran mengenai penetapan sektor unggulan sebagai *leading* sektor suatu kegiatan ekonomi industri, sehingga dalam pembahasannya sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan (Kalzum, 2018).

Apabila nilai $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di suatu daerah lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya, apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor tersebut di suatu daerah lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Sehingga $LQ > 1$ menunjukkan bahwa peranan sektor *i* cukup menonjol di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah

tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. Atas dasar itu $LQ > 1$ secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud.

Analisis LQ mempunyai rumus yang sangat sederhana, sehingga apabila digunakan dalam bentuk *one shot analysis* hanya akan melihat apakah LQ berada diatas 1 atau tidak, maka manfaat yang dihasilkan tidak akan begitu besar. Akan tetapi, apabila dilakukan dalam bentuk *time series/trend*, maka analisis LQ akan lebih menarik, artinya dianalisis untuk untuk beberapa kurun waktu tertentu. Metode LQ biasanya dikombinasikan dengan analisis tipologi klassen, analisis *shift-share*, indeks spesialisasi wilayah, dan metode lain yang relevan (Jef, dkk, 2021).

2.1.8 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Analisis *Shift Share* adalah alat yang membagi pertumbuhan variabel ekonomi di wilayah tertentu (negara, wilayah dan kota) menjadi berbagai komponen (Shi dan Yang, 2008).

Metode *shift share* dalam menganalisis pertumbuhan daerah ternyata sudah ada sejak awal 1940-an oleh Daniel Creamer, dimana keunggulan suatu komoditas perlu dievaluasi tidak hanya secara komparatif tetapi dievaluasi juga secara kompetitif (Marianus, dkk, 2018).

Analisis *Shift Share* merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Analisis *Shift Share* mampu memberikan gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktivitas disuatu wilayah yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam metode LQ, dalam artian metode *Shift-Share* lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian

berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur sektor (industri) suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Analisis *Shift Share* menurut Yuyu, Unang, dan Betty (2021) merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Penentuan Komoditas Unggulan Sub Sektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Setiap Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya	Yayu Setiani, Unang dan Betty Rofatin.	Menggunakan analisis Location quotient (LQ) dan Shift Share. Penelitian berdasarkan tiap kecamatan.	Lokasi penelitian. Fokus penelitian pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.
2	Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Banjar	Ulfa Fauzia, Sidharta Adyatma, dan Deasy Arisanty	Menggunakan analisis Location quotient (LQ) dan Shift Share. Penelitian berdasarkan tiap kecamatan.	Lokasi penelitian. Fokus penelitian pada tiap sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan).
3	Analisis Produk Unggulan Pada Jagung Dan Kedelai Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Di Wilayah Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Barat Dengan Menggunakan Metode Location Quotient (LQ) Dan Shift Share Analysis (SSA)	Darfial Guslan, Sannia Siti Rubbiah, dan Ekra Sanggala	Menggunakan analisis Location quotient (LQ) dan Shift Share.	Lokasi penelitian. Fokus penelitian pada komoditas jagung dan kedelai.
4	Penentuan Kawasan Unggulan Agribisnis Ternak Domba di Jawa Barat	Achmad Firman, Linda Herlina, Maman Paturochman, dan M. Munandar Sulaeman	Menggunakan analisis Location quotient (LQ).	Lokasi penelitian. Fokus penelitian pada ternak domba. Menggunakan analisis daya tamping (analisis kebutuhan pakan, analisis

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
				potensi pakan, daya tampung ternak, dan indeks daya dukung (IDD)).
5	Pengarahannya Pusat Pertumbuhan Melalui Analisis Keunggulan Komparatif di Kabupaten Garut	Endah Djuwendah, Hepi Hapsari, dan Erna Rachmawati	Lokasi penelitian. Menggunakan analisis Location Quotient (LQ).	Fokus penelitian pada sub sektor tanaman pangan. Menggunakan analisis keefisien lokasi, analisis koefisien spesialisasi, analisis ketersediaan fasilitas social ekonomi, metode skalogram, dan metode skorsentralitas.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian di atas dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas diantaranya yaitu tujuan dari penelitian untuk komoditas pertanian yang menjadi unggul (basis) di setiap daerahnya. Selain itu, terdapat persamaan dengan alat analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu, yaitu analisis *Location Quotient* dan analisis *Shift-Share*. Untuk perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada waktu atau periode, subjek yang akan diteliti, serta lokasi penelitian.

2.3 Pendekatan Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri dengan asas otonomi daerah. Kabupaten Garut sebagai daerah otonom, sehingga perlu cermat dalam mengenali dan memberdayakan potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dengan menentukan sektor mana yang produktif serta mempunyai daya saing tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah jangka panjang. Akan tetapi, tidak semua sektor dapat tumbuh dengan kemampuan yang sama sehingga perlu lebih memanfaatkan sektor basis yang dianggap mampu mendorong pembangunan daerah.

Kabupaten Garut sebagai daerah otonom harus mampu mengenali potensi yang dimiliki daerahnya. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Kabupaten Garut. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-

2024, penyelenggaraan urusan pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

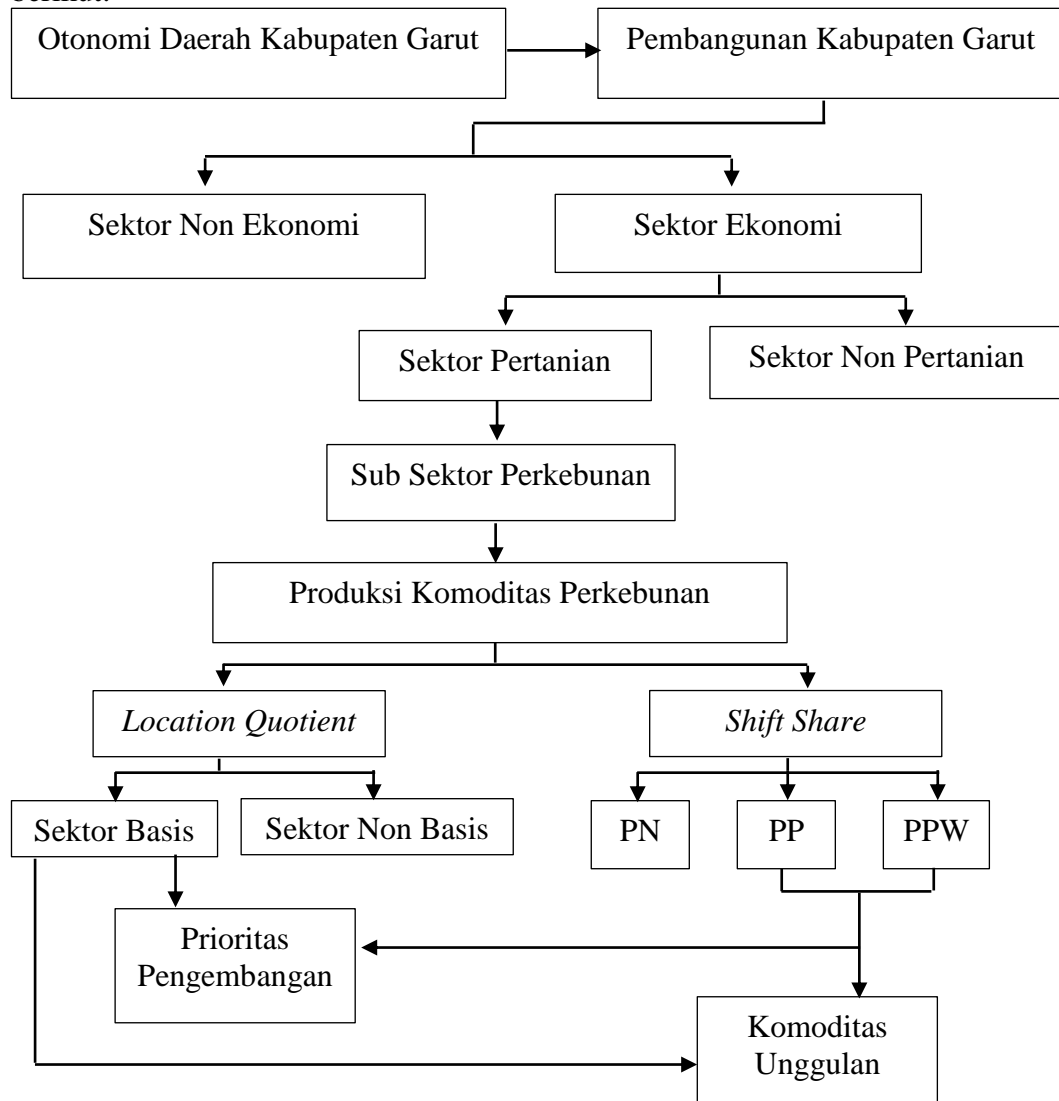
Agar rencana Kabupaten Garut mampu berdaya saing di bidang agribisnis dapat terealisasi khususnya pada sub sektor perkebunan maka perlu adanya analisis komoditas unggulan pada sub sektor perkebunan di Kabupaten Garut, terutama pada potensi di masing-masing kecamatan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing kecamatan memiliki perbedaan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan pertanian, yang dikarenakan tiap kecamatan memiliki potensi dan keadaan alam yang berbeda dalam pengembangan komoditas tertentu. Komoditas pertanian yang dapat mendukung pembangunan pertanian merupakan komoditas basis yang mempunyai prioritas pengembangan dan merupakan komoditas unggulan.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi komoditas sub sektor perkebunan unggulan dengan melalui pendekatan LQ. Komoditas sub sektor perkebunan yang mempunyai nilai $LQ > 1$ merupakan komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas sub sektor perkebunan rakyat unggulan (basis) di Kabupaten Garut yang dapat dipertahankan dan ditingkatkan pengembangannya. Diharapkan komoditas yang menjadi unggulan tersebut dapat mendorong pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Garut. Kemudian komoditas yang memiliki nilai $LQ > 1$, akan di analisis menggunakan analisis *shift share* untuk menentukan pertumbuhannya. Komoditas sub sektor perkebunan rakyat yang dianalisis adalah komoditas yang mempunyai nilai basis, sedangkan yang mempunyai nilai non basis tidak dianalisis pertumbuhannya.

Analisis *shift share* terdiri dari tiga komponen yaitu komponen Pertumbuhan Nasional (PN), komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), dan komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Analisis komponen pertumbuhan yang difokuskan pada penelitian ini adalah komponen PP dan PPW.

Penentuan prioritas pengembangan komoditas sub sektor perkebunan di wilayah kecamatan di Kabupaten Garut, dapat dilihat berdasarkan gabungan nilai LQ dan analisis komponen PP dan PPW.

Alur pendekatan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar. 2 berikut:



Gambar 2. Alur Pendekatan Masalah